



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 ini sebagai penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja 2025 yang merupakan implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sampai dengan akhir Tahun 2025.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1.Latar Belakang I-1

 1.2.Landasan Hukum I-2

 1.3.Maksud dan Tujuan I-3

 1.3.1. Maksud I-3

 1.3.2. Tujuan..... I-4

 1.4.Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN I 2025..... II - 1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan
Triwulan I Tahun 2025 II - 1

 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Yogyakarta..... II-12

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta
..... II-31

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN..... III - 1

 3.1.Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan RSUD Kota Yogyakarta..... III - 1

 3.2.Program dan Kegiatan III - 2

 3.3.Crosscutting Kinerja III-10

BAB IV PENUTUP IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat TW I Tahun 2025 II-2

Tabel 2.2 Target dan Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota TW I Tahun 2025 II-4

Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta TW I Tahun 2025 II-4

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (RSUD Kota Yogyakarta) TW I Tahun 2025 II-7

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun TW I Tahun 2025..... II-14

Tabel 2.6 Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap Periode Jan sd Mar 2025 II-15

Tabel 2.7 Jumlah Kunjungan Berdasarkan Cara Bayar TW I Tahun 2025..... II-29

Tabel 2.8 Laporan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Bulan Maret 2025... II-30

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta III-1

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta III-2

Tabel 3.3 Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Pelaksanaan kegiatan OPD dalam 1 tahun anggaran berpedoman pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Jika dalam tahun berjalan terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya hal-hal yang terjadi diluar perkiraan, akan dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui mekanisme Perubahan Renja.

Dokumen Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renja ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 dan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 serta memperhatikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan P-RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting RSUD Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta semester 1 tahun 2025, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah dokumen penyesuaian perencanaan untuk periode tahun anggaran perubahan yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

1. Menyediakan penyempurnaan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta pada periode anggaran perubahan 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja RSUD Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RSUD Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Yogyakarta
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja 2025 ini diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja periode sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian sasaran, program, dan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025. Pada tahun 2025, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 program, 10 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Tahun 2025 sejumlah Rp.151.461.077.075,- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, sampai dengan triwulan I telah mencapai realisasi fisik sebesar 26,13% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.897.353.419,- atau sebesar 17,10%.

Pelaksanaan program-program RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu: Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan; Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal; Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Keperawatan. Target dan capaian indikator program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sampai dengan triwulan I pada tahun 2025 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TW I Tahun 2025

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	85%	94,93%	110,38%
2	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	84%	87,03%	103,61%
3	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	80,75%	26,73%	33,10%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas:

1. Indikator Program Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan.
Pada tahun 2025 belum dilakukan pengukuran indikator ini karena pengukuran dilakukan setiap semester, capaian indikator pada tabel diatas adalah pengukuran pada semester II tahun 2024 dengan hasil telah tercapai melebihi target tahun 2025.
2. Indikator Program Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS.
Seperti halnya dengan indikator program Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan, pada indikator program Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS juga dilakukan pengukuran setiap semester, sehingga capaian indikator program dalam tabel diatas juga merupakan hasil pengukuran pada semester II tahun 2024 yang telah tercapai melebihi target sebesar 103,61%
3. Indikator Program Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal.
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal dengan jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola RS. Realisasi pada TW I 2025 sebesar 26,73% atau tercapai sebesar 33,10% dari target tahun 2025.

Faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian program ini adalah adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait penunjukan RSUD sebagai RS mampu PONEK, sebagai pengampu layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro), KIA, gastrohepatologi, diabetes melitus, infeksi emerging, kesehatan jiwa dan pengampu rujukan kasus TB-RO (Tuberkulosis Resisten Obat) oleh Kementerian Kesehatan RI.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah terdapat 1 barang yang turun tayang di e-katalog (bronchoscopy) yang bersumber DAK Fisik, sehingga pelaksanaan pengadaan mundur dari tata kala. Selain itu juga terdapat hambatan dalam pengadaan obat

dan BHP medis yang berasal dari barang impor dikarenakan belum adanya ijin impor atas barang-barang tersebut sehingga pengadaan tertunda menunggu proses usulan ijin impor susulan.

Dalam Renja 2025 program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.26.630.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.702.349.072,- atau terserap 2,64 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.734.000.000,- dan belum ada realisasi keuangan sampai dengan triwulan I 2025.
 - b. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.475.000.000,- dan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, belum ada realisasi keuangan.
 - c. Pengembangan Rumah Sakit
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.8.601.000.000,- dan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, belum ada realisasi keuangan.
 - d. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.820.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.702.349.072,- atau terserap 6,49 persen.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.183.493.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.777.000,- atau terserap 3,15 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
 - a. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.43.493.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.777.000,- atau terserap 13,28 persen.
 - b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.105.000.000,- dan sampai dengan triwulan I 2025 belum ada realisasi keuangan.
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.35.000.000,- dan sampai dengan triwulan I 2025 belum ada realisasi keuangan.

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,- dan belum ada realisasi, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,- dan masih dalam proses administrasi pembayaran.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 2 indikator, yaitu: Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat dan Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran. Program ini dilaksanakan oleh 2 bagian, yaitu: Bagian Umum serta Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Target dan capaian indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan I tahun 2025 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target dan Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	100%
2	Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	100%	25,94%	25,94%

Berdasar tabel 2.2 tersebut, Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, akan tetapi capaian tersebut adalah penilaian tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 sedangkan penilaian atas kinerja tahun 2024 belum dilakukan evaluasi. Capaian Indikator Program Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 25,94%.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.124.377.584.075,- dengan realisasi sebesar Rp.25.189.227.347,- terserap sebesar 20,25 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sudah menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terukur melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga operasional RSUD Kota Yogyakarta diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk pengajuan klaim jaminan kesehatan telah difasilitasi melalui aplikasi oleh BPJS Kesehatan sehingga lebih efisien dan efektif serta diupayakan sesegera mungkin dengan memenuhi persyaratan klaim sesuai ketentuan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

membutuhkan persiapan dan koordinasi intensif dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk konsistensi dalam pencapaian sasaran organisasi.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.3 dan evaluasi capaian hasil indikator kinerja triwulan I tahun 2025 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta TW I Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					
			Target Kinerja		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	85,00%	27.083.493.000,00	93.41%	708.126.072,00	116.76%	2,61%	
	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	80,75%		80.97%		100,90%		
	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	84,00%		88.89%		111,11%		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			4.734.000.000,00		0	11,80%	0,00%
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 unit		11.80%		0,00%	
2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.475.000.000,00		0	2.02%	0,00%
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13 paket		2.02%		0,00%	
3	Pengembangan Rumah Sakit			8.601.000.000,00			25,00%	0,00%
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit		25,00%	0	25,00%	
4	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			10.820.000.000,00		702.349.072,00	25,00%	6.49%
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 paket		25,00%		25,00%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			43.493.000,00		5.777.000,00	10,00%	13.28%
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 dokumen		10,00%		10,00%	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			35.000.000,00		0	5,00%	0%
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 orang		5%		5,00%	0%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			105.000.000,00		0	5,00%	0%

		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 orang		5%		5,00%	0%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			270.000.000,00	100,00%	0	0%	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen		100,00%		0,00%	
Rata-rata capaian kinerja							98,69%	95,00%
Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pendapatan BLUD Rumah Sakit	100,00%	124.377.584.075,00	25,94 %	25.189.227.347,00	25,94%	20,25%
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai		A		100,00%	
PerencanaanPenganggaranandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.450.000,00	27,27%	2.590.000,00	27,27%	24,78%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen		27,27%		27,27%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.434.000,00	17,78%	1.837.000,00	17,78%	17,61%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan		17,78%		17,78%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			5.073.000,00		841.000,00	20,83%	16,58%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen		20,83%		20,83%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			83.333.250,00	100,00%	0	100,00%	85,00%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		100,00%		0,00%	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			254.043.719,00	100,00%	0	100,00%	88,77%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket		100,00%		0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			31.151.200.000,00	100,00%	624.733.014,00	100,00%	94,78%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		100,00%		0,00%	
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.880.000.000,00	99,99%	1.312.947.230,00	100,00%	98,77%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		99,99%		0,00%	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			77.700.000,00	100,00%	9.740.420,00	100,00%	99,91%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit		100,00%		100,00%	
9	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			76.920.000,00	100,00%	3.970.140,00	100,00%	61,24%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit		100,00%		100,00%	
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			336.334.170,00	100,00%	23.260.000,00	100,00%	98,47%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	284 unit		100,00%		0,00%	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			111.685.936,00	100,00%	0	100,00%	99,90%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		100,00%		0,00%	
Peningkatan Pelayanan BLUD								
12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			114.380.410.000,00	97,85%	23.209.308.543,00	97,85%	80,86%
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja		97,85%		0,00%	
Rata-rata capaian kinerja							99,82%	92,22%
Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Total anggaran dari seluruh program				151.461.077.075,00		25.897.353.419,00		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							99,37%	84,69%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							Sangat Tinggi	Tinggi

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (RSUD Kota Yogyakarta) TW I Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	82%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A nilai	0	A nilai	0	A nilai	124.377.584.075,00	A nilai	30.656.126.000,00	A nilai	25.189.227.347,00	0,00%	82,17%					Kepala Bagian Keuangan PEP	
			Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan : Target Pendapatan dalam 1 Tahun Anggaran x 100	100%		116.26 %		100%		29.47% %		25.94% %		88,02%						Kepala Bagian Umum	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 dokumen		5 dokumen	10.450.000,00	3 dokumen	2.850.000,00	3 dokumen	2.590.000,00	100,00%	90.88%						
		1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		0		10.450.000,00	27,27%	2.850.000,00	27,27%	2.590.000,00	100,00%	90,88%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		27.27%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12,00 laporan		12 laporan	10.434.000,00	3 laporan	1.855.000,00	3 laporan	1.837.000,00	100,00%	99.03%						
		1.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			0		0		10.434.000,00	17,78%	1.855.000,00	17,78%	1.837.000,00	100,00%	99,03%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		17.78%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3,00 dokumen		3 dokumen	5.073.000,00	0 dokumen	845.000,00	0 dokumen	841.000,00	0,00%	99.53%						
		1.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		0		5.073.000,00	20,83%	845.000,00	20,83%	841.000,00	100,00%	99,53%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		20.83%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00 paket		1 paket	337.376.969,00	1 paket	0	1 paket	0	100,00%	NAN%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2,00 paket		2 paket		0 paket		0 paket		0,00%						Kepala Bagian Umum	
		1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		0		83.333.250,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		100.00%		0,00%		0,00%							
		2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		0		254.043.719,00	31,41%	0	4,00%	0	12,73%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		31.41%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12,00 laporan		12 laporan	9.031.200.000,00	3 laporan	2.102.800.000,00	3 laporan	1.937.680.244,00	100,00%	92.15%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12,00 laporan		12 laporan		3 laporan		3 laporan		100,00%						Kepala Bagian Umum	
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0		0		3.151.200.000,00	25,02%	787.800.000,00	25,02%	624.733.014,00	100,00%	79,30%						
				Laporan			Laporan		12 Laporan		25,02%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0		0		5.880.000.000,00	24,18%	1.315.000.000,00	24,18%	1.312.947.230,00	100,00%	99,84%						
				Laporan			Laporan		12 Laporan		24,18%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3,00 unit		3 unit	602.640.106,00	0 unit	80.276.000,00	0 unit	36.970.560,00	0,00%	46,05%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11,00 unit		11 unit		0 unit		0 unit		0,00%						Kepala Bagian Umum	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				290,00 unit		284 unit		82 unit		82 unit		100,00%						Kepala Bagian Umum	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1,00 unit		1 unit		0 unit		0 unit		0,00%						Kepala Bagian Umum	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0		0		77.700.000,00	24,99%	12.600.000,00	24,99%	9.740.420,00	100,00%	77,30%						
				Unit			Unit		3 Unit		24,99%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0		0		76.920.000,00	24,99%	12.600.000,00	24,99%	3.970.140,00	100,00%	31,51%						
				Unit			Unit		11 Unit		24,99%		0,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		0		336.334.170,00	29,24%	55.076.000,00	30,24%	23.260.000,00	103,42%	42,23%						
				Unit			Unit		284 Unit		29,24%		0,00%		0,00%							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		0		111.685.936,00	0,00%	0	2,00%	0	0,00%	0,00%						
				Unit			Unit		1 Unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1,00 unit kerja		1 unit kerja	114.380.410.000,00	0 unit kerja	28.467.500.000,00	0 unit kerja	23.209.308.543,00	0,00%	81.53%						
		1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0		0		114.380.410.000,00	26,25%	28.467.500.000,00	26,37%	23.209.308.543,00	100,46%	81,53%						
				Unit Kerja			Unit Kerja		1 Unit Kerja		26,25%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																						
Predikat kinerja																						
	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Instrumen mutu asuhan keperawatan	((Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3) x 100	86,00%	0	94.93 %	0	85%	27.083.493.000,00	86% %	1.908.690.600,00	94.93% %	708.126.072,00	Sangat Tinggi	Tinggi	110,38%	37,10%			Kepala Bidang Keperawatan	
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	(Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal : Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%	81%		80.93 %		81%		25% %		26.76% %		107,04%					Kepala Bidang Pelayanan Penunjang		
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	(Jumlah Indikator SPM yang Tercapai : Jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis) x 100	85%		87.04 %		84%		82.25% %		87.03% %		105,81%					Kepala Bidang Pelayanan Medis		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan				17,00 unit		4 unit	26.630.000.000,00	0 unit	1.899.992.000,00	0 unit	702.349.072,00	0,00%	36.97%						
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				17,00 unit		14 unit		3 unit		3 unit		100,00%					Kepala Bidang Pelayanan Penunjang		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12,00 paket		12 paket		3 paket		3 paket		100,00%					Kepala bidang pelayanan penunjang		
			Jml RS yg ditingkatkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS berdasarkan kelas RS yg memenuhi rasio tmp tidur thd jml penduduk minimal satu banding seribu dan atau dlm rangka peningkatan kapasitas pelayanan RS				1,00 unit		1 unit		0 unit		0 unit		0,00%					Kepala Bidang Keperawatan		

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
		1)Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			0		0		4.734.000.000,00	25,00%	0	11,80%	0	47,20%	0,00%							
		2)Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Unit	0		0	4 Unit	2.475.000.000,00	2,02%	0	0,00%	0	100,00%	0,00%							
		3)Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			0		0	14 Unit	8.601.000.000,00	1,22%	0	25,00%	0	2049,18%	0,00%							
		4)Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			0		0	1 Unit	10.820.000.000,00	30,50%	1.899.992.000,00	24,99%	702.349.072,00	81,93%	36,97%							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Paket		Paket		12 Paket		30,50%		0,00%		0,00%								
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1,00 orang		110 orang	183.493.000,00	0 dokumen	8.698.600,00	0 orang		0,00%						Kepala Bidang Keperawatan		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1,00 orang		40 orang		0 orang		0 orang		0,00%						Kepala Bidang Keperawatan		
		1)Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			0		0		43.493.000,00	20,00%	8.698.600,00	10,00%	5.777.000,00	50,00%	66,41%							
		2)Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Dokumen	0	Dokumen	0	2 Dokumen	105.000.000,00	0,00%	0	20,00%	0	0,00%	0,00%							
		3)Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	0	Orang	0	110 Orang	35.000.000,00	0,00%	0	5,00%	0	0,00%	0,00%							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Orang		Orang		40 Orang	270.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00%	NAN%							
		1)Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0		0		270.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								1214,16%		51,69%						
							Predikat kinerja								Sangat Tinggi		Rendah						
Total anggaran dari seluruh program										151.461.077.075,00		32.564.816.600,00		25.897.353.419,00									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																304,08%		79,53%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																Sangat Tinggi		Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Adanya kebutuhan persiapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai Juni 2025, pemenuhan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar KRIS telah dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2025. Masih dalam proses renovasi bangsal KRIS (bangsal bougenvil) yang ditargetkan selesai TA 2025. 2. Adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait dengan penunjukan RS jejaring pengampunan 10 layanan prioritas Kemenkes RI, 10 layanan tersebut adalah: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kardiovaskular, Uronefrologi, Diabetes Melitus, Gastrohepatologi, Kanker, Stroke, Respirasi dan Tuberkulosis (TB), Penyakit Infeksi Emerging, dan Kesehatan Jiwa.																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Banyak SDM yang sudah purna tugas dan belum ada penggantinya, sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan terganggu, sudah dilakukan rekrutmen pegawai BLUD pada awal 2025 tetapi kebutuhan SDM belum seluruhnya terpenuhi. Ada regulasi yang mengarahkan supaya tempat tidur KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan dipersiapkan mulai dari tahun 2024 dengan target 1 Juni 2025 selesai tetapi belum mulai diterapkan penggunaannya (tarif KRIS belum ada).																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Agar mempercepat penyelesaian renovasi Bangsal Bougenvil sebagai prioritas utama dalam rangka implementasi KRIS BPJS Kesehatan yang ditargetkan pada Juni 2025. Bersama dengan itu, berkoordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan terkait kejelasan tarif KRIS dan mekanisme implementasinya pasca Juni 2025. Di sisi lain, segera melakukan analisis kebutuhan SDM secara komprehensif berdasarkan layanan prioritas dan proyeksi beban kerja KRIS, serta menindaklanjuti proses rekrutmen pegawai BLUD untuk mengisi kekosongan akibat purna tugas, dengan fokus pada pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar layanan prioritas.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			: Mengevaluasi secara menyeluruh implementasi KRIS BPJS Kesehatan, termasuk penyesuaian sarana prasarana, alokasi SDM, dan dampak terhadap kualitas serta akses layanan. Berdasarkan evaluasi tersebut, menyusun rencana pengembangan kapasitas layanan prioritas secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan profesional, serta pengusulan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana dan alkes yang mendukung layanan prioritas. Selain itu, akan dilakukan kajian terhadap efektivitas rekrutmen BLUD dan merumuskan strategi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan SDM, termasuk kemungkinan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan.																				

Dari data sebagaimana Tabel 2.4 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 RSUD Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 20 sub kegiatan dengan 20 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target walaupun hasil tersebut merupakan hasil pengukuran periode sebelumnya; dan
 - c. Dari 20 indikator kinerja sub kegiatan, semua indikator masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan tata kala sebagian berada pada triwulan III dan IV.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan triwulan I Tahun 2025 RSUD Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 20 sub kegiatan dengan 20 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan seluruh indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
 - c. Dari 20 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja RSUD Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna. Sedangkan fungsi RSUD antara lain:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas RSUD.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan RSUD Kota Yogyakarta meliputi:

1. Pelayanan medis paripurna;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;

3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelayanan penelitian dan pengembangan;
7. Penapisan teknologi bidang kesehatan;
8. Pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit; dan
9. Tugas lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Wali Kota Yogyakarta.

Upaya RSUD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan predikat baik
2. Tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal) pelayanan Rumah Sakit
3. Skor persepsi pasien atas asuhan keperawatan dengan predikat memuaskan

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja RSUD Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Sasaran RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan TW I Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi
		2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sasaran:								
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien	Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna
Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A

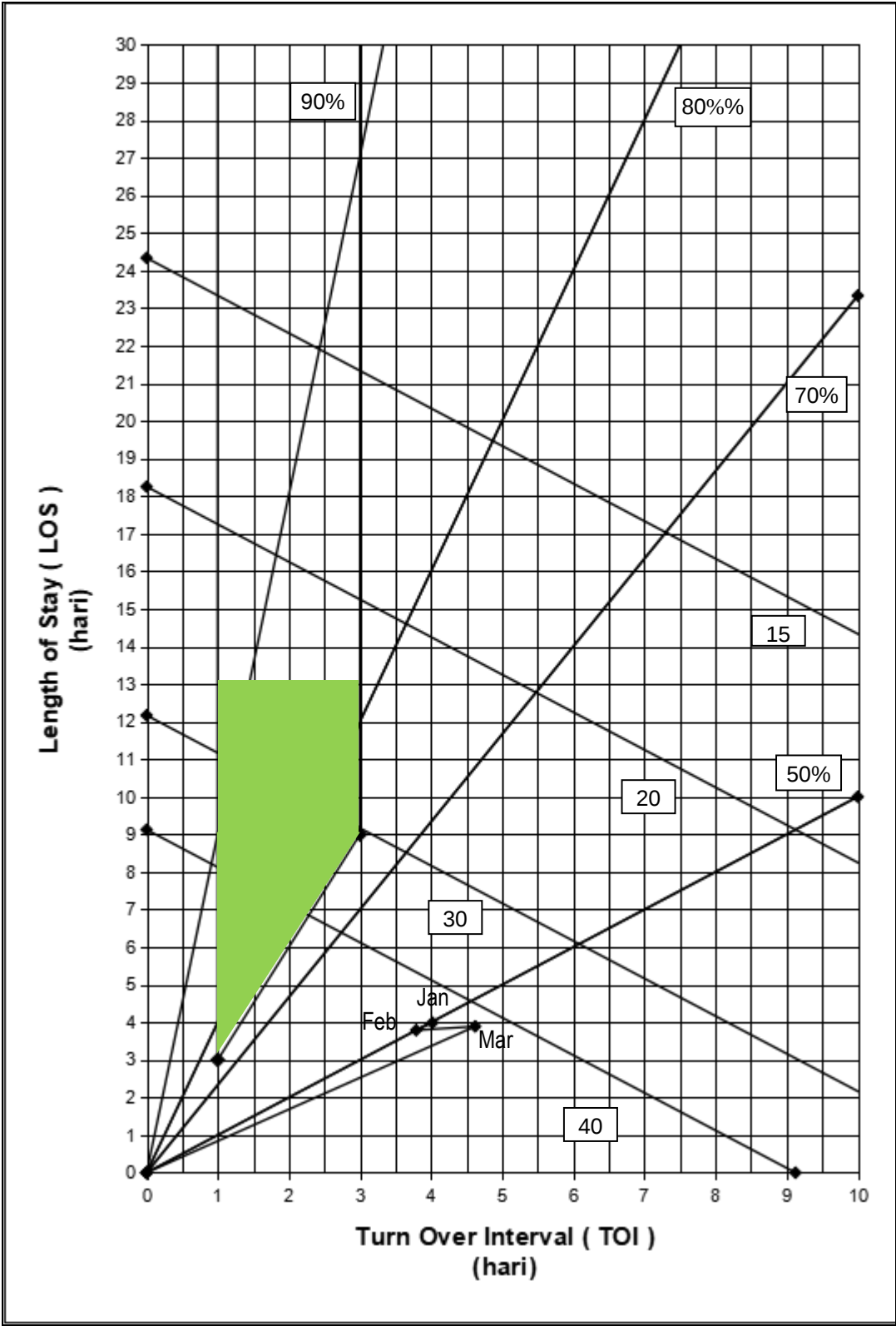
Pencapaian target sasaran RSUD Kota Yogyakarta Tahun triwulan I tahun 2025 tersebut dalam tabel di atas adalah hasil pengukuran periode sebelumnya, dimana Sasaran Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Akreditasi Paripurna, telah dapat mencapai target dimana realisasi dan targetnya adalah Lulus Akreditasi Paripurna dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Sedangkan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta memilili indikator Hasil Penilaian Mandiri

Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat pada penilaian tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 mendapatkan nilai A.

ANALISIS DATA PELAYANAN KESEHATAN RSUD KOTA YOGYAKARTA SAMPAI DENGAN BULAN TW I 2025

A. PELAYANAN RAWAT INAP

Grafik 1
Grafik Barber Johnson
Periode: Jan s.d. Mar 2025

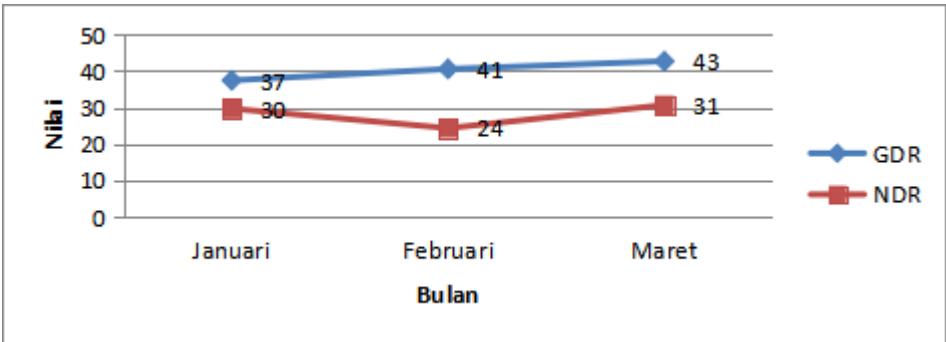


Tabel 2.6
Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap
Periode: Jan s.d. Mar 2025

Bulan	BOR (Dalam %)	LOS (Dalam Hari)	TOI (Dalam Hari)	BTO (Dalam Kali)
Januari	49.94	3.99	4.02	3.86
Februari	50.23	3.79	3.79	3.68
Maret	44.41	3.89	4.62	3.73
Nilai Ideal	60-85%	6-9	1-3	> 30

Grafik barber Johnson merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Titik performance pelayanan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta periode triwulan 1 tahun 2025 belum berada pada daerah efisien. Titik performance Grafik Barber Johnson dari Januari s.d. Februari 2025 menjauhi daerah efisien.

Grafik 2
Grafik Indikator GDR & NDR
Periode: Januari s.d. Maret 2025

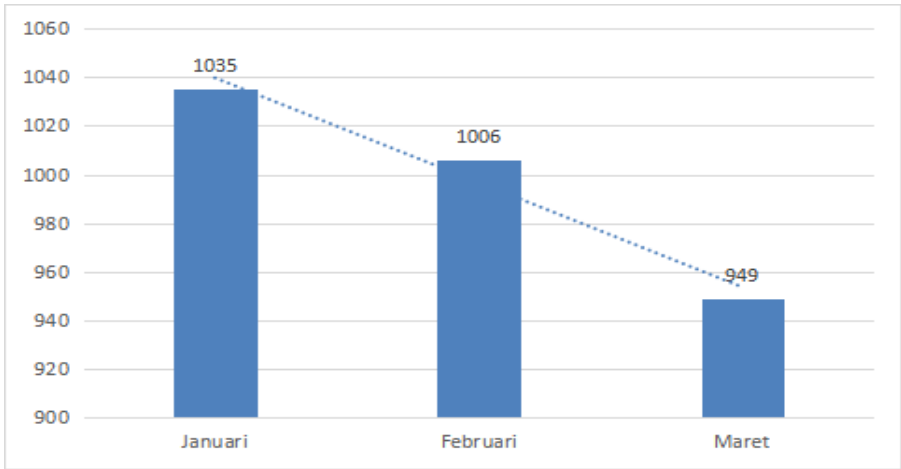


Standar nilai ideal GDR oleh Kemenkes RI adalah sebesar kurang dari 45 permil. Nilai GDR di RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari s.d. Maret 2025 berada dalam kategori ideal tetapi tren peningkatannya patut diwaspadai. Perlu analisis penyebab umum kematian dan penguatan upaya pencegahan. Sedangkan standar untuk nilai NDR adalah kurang dari 25 permil. Nilai NDR RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari s.d. Maret 2025, hanya di bulan Februari yang berada dalam kategori ideal atau kurang dari 25 permil.

Sebagai catatan bahwa semakin tinggi nilai Gross Death Rate berarti semakin tinggi pula angka kematian kotor. Begitu pula dengan Net Death Rate, semakin tinggi nilai Net Death Rate semakin tinggi pula angka kematian bersih. Artinya jika nilai Gross Death Rate maupun Net Death Rate semakin tinggi, maka mutu pelayanan yang diberikan asumsinya adalah semakin buruk. Oleh karena itu rumah sakit perlu memperbaiki pelayanan, baik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun memberikan pelatihan kepada tenaga medis khususnya pelatihan dalam menangani pasien yang sedang mengalami kritis agar angka Gross Death Rate maupun Net Death Rate dapat menurun.

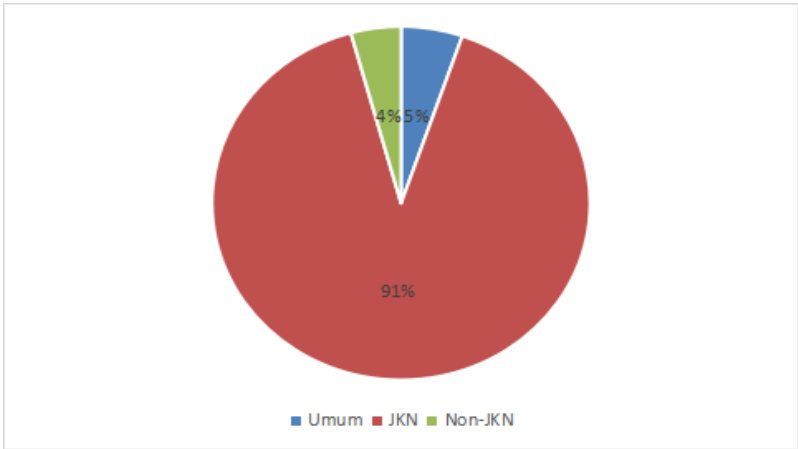
Angka Gross Death Rate dan Net Death Rate yang meningkat dan di atas standar nasional menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien selama rawat inap dirumah sakit belum baik. Banyak faktor – faktor yang berpengaruh dalam kematian tersebut seperti, tingkat keparahan suatu penyakit, kecekatan dan kesigapan pelayanan perawatan, serta ketepatan pengobatan, menjadi hal yang sangat diperhatikan dan berpengaruh. Pasien yang meninggal sebelum mendapat perawatan 48 jam diasumsikan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi sakit berat sehingga sangat dimungkinkan meninggalnya pasien termasuk bukan karena kurangnya mutu pelayanan medis, tetapi karena memang kondisi pasien yang sudah sakit berat.

Grafik 3
Jumlah Pasien Dirawat
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Jumlah kunjungan rawat inap menunjukkan tren penurunan dari Januari hingga Maret 2025. Tren penurunan jumlah pasien perlu ditelaah lebih lanjut. Grafik ini menunjukkan pola musiman, yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti libur panjang atau pengaruh cuaca yang memengaruhi pola kunjungan.

Grafik 4
Persentase Jumlah Pasien Keluar Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar
Periode: Januari s.d. Maret 2025

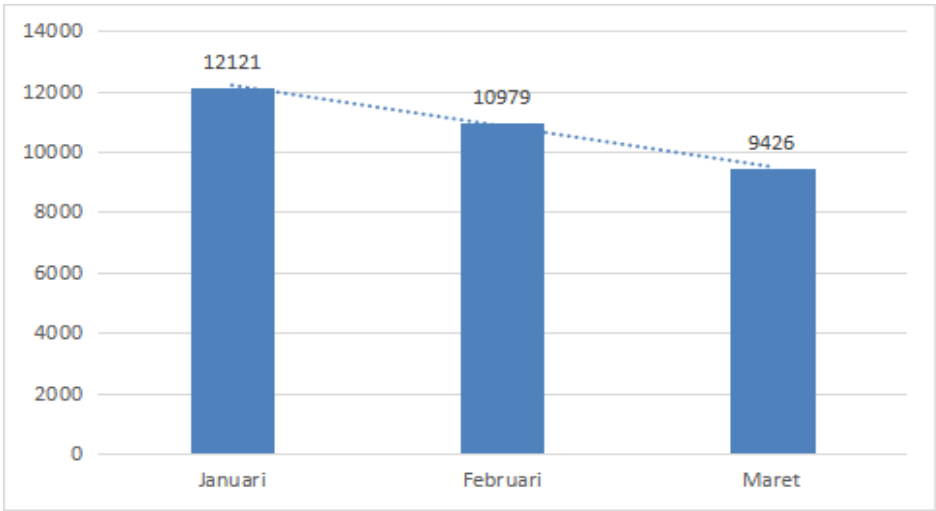


Apabila dilihat dari cara bayar pasien, prosentase jumlah pasien rawat inap dengan cara bayar JKN menjadi peringkat tertinggi pada periode Triwulan I Tahun 2025 sebesar 91% (2049) diikuti cara bayar umum sebesar 5% (119) dan Non-JKN sebesar 4% (97). Data menunjukkan bahwa program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) memainkan peran penting dalam pelayanan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta, dengan proporsi pasien yang sangat besar dibandingkan kategori lainnya.

B. PELAYANAN RAWAT JALAN

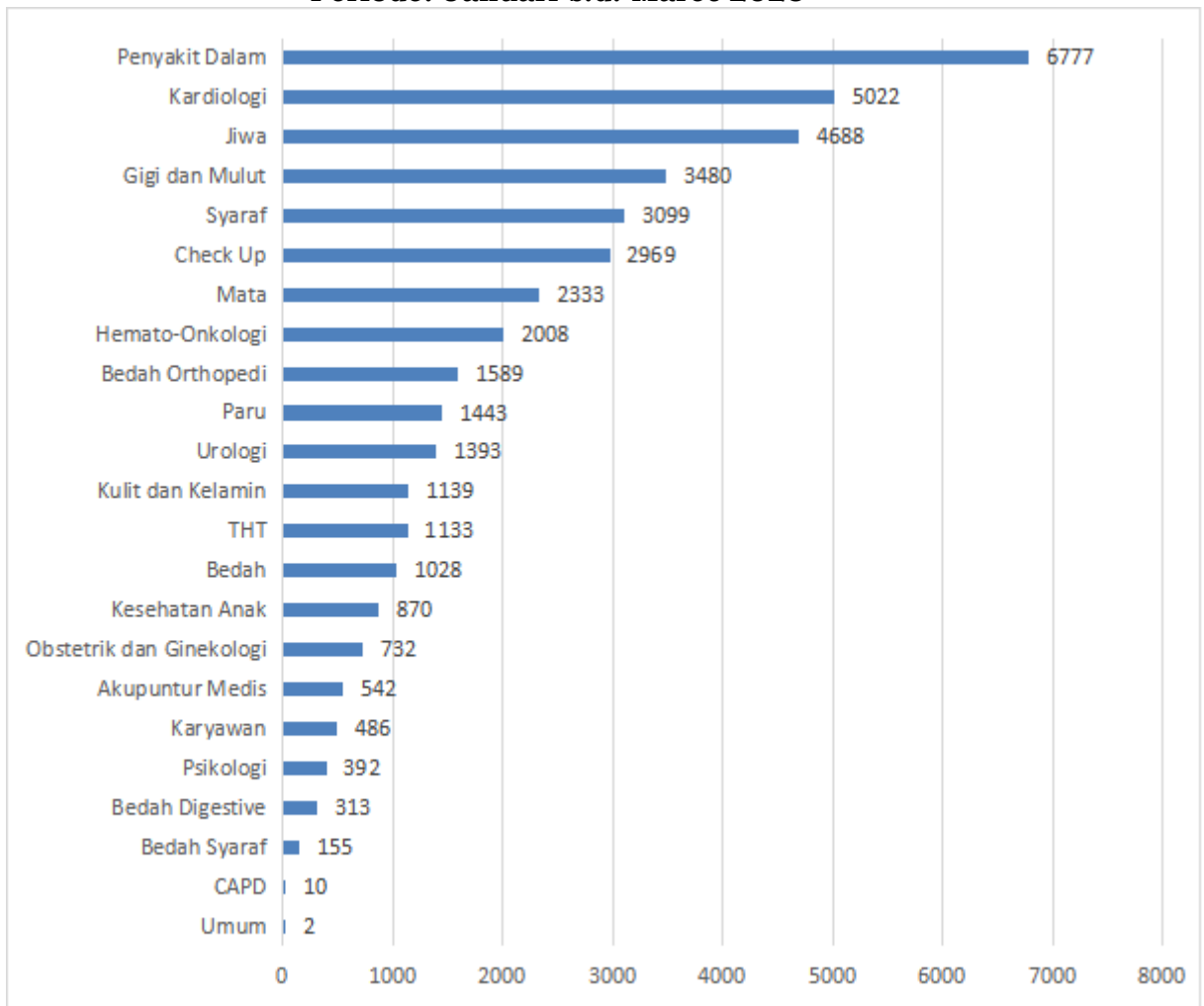
1. POLIKLINIK RAWAT JALAN

Grafik 5
Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



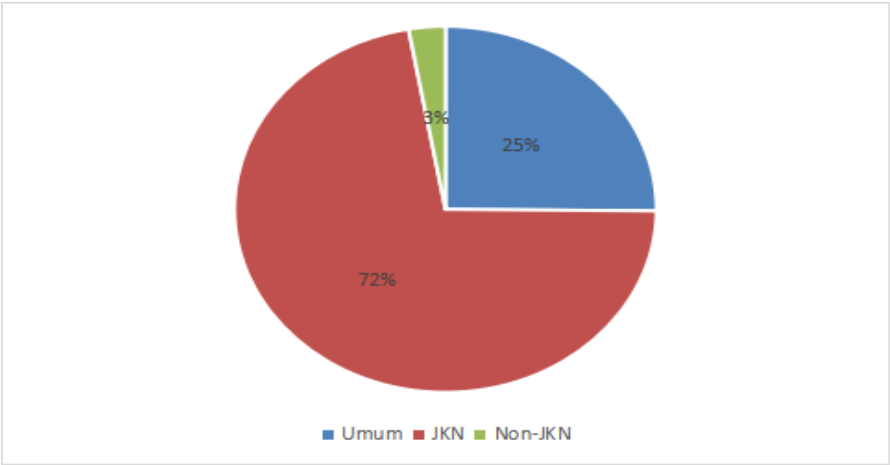
Secara keseluruhan, terdapat tren penurunan jumlah kunjungan pasien dari Januari s.d. Maret 2025. Dari Januari ke Februari, kunjungan menurun sebanyak 1.142 pasien (sekitar 9,4%). Dari Februari ke Maret, penurunan sebesar 1.553 pasien (sekitar 14,1%). Total penurunan dari Januari ke Maret mencapai 2.695 pasien, atau sekitar 22,2% dari jumlah awal di bulan Januari.

Grafik 6
Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Poliklinik rawat jalan RSUD Kota Yogyakarta didominasi oleh kunjungan pada layanan Penyakit Dalam, Kardiologi, dan Jiwa mencerminkan kebutuhan kesehatan yang tinggi untuk penyakit kronis dan kesehatan mental. Di sisi lain, poliklinik dengan jumlah kunjungan rendah perlu dievaluasi, baik dari segi promosi maupun kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan akses dan relevansi layanan.

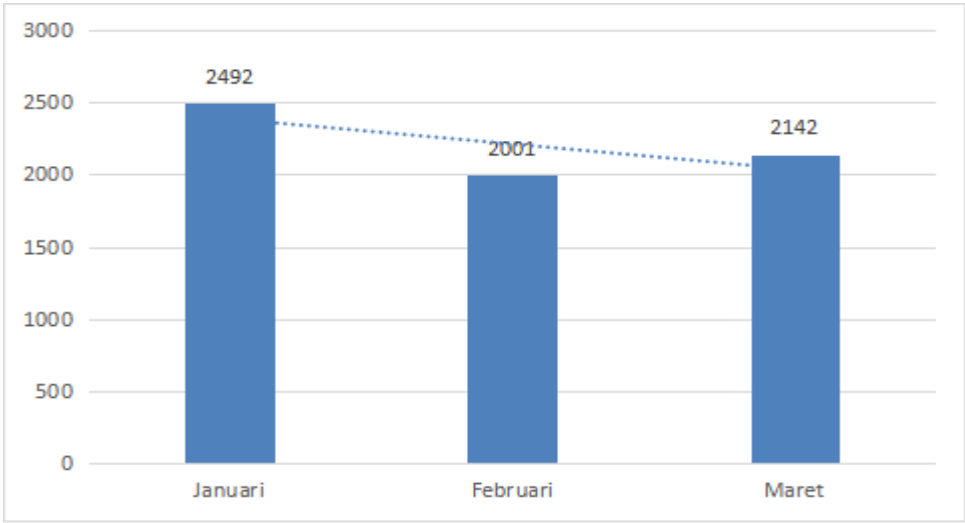
Grafik 7
Persentase Jumlah Kunjungan Poliklinik Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Apabila dilihat dari cara bayar pasien, prosentase jumlah kunjungan pasien poliklinik rawat jalan dengan cara bayar JKN sebesar 72% (23437), Umum sebesar 25% (8178) dan Non-JKN sebesar 3% (911). Mayoritas pasien rawat jalan RSUD Kota Yogyakarta adalah pengguna JKN, mencerminkan pentingnya program tersebut dalam memberikan akses kesehatan yang luas. Sementara itu, pasien Umum tetap menjadi segmen yang signifikan, sementara penggunaan Non-JKN relatif rendah.

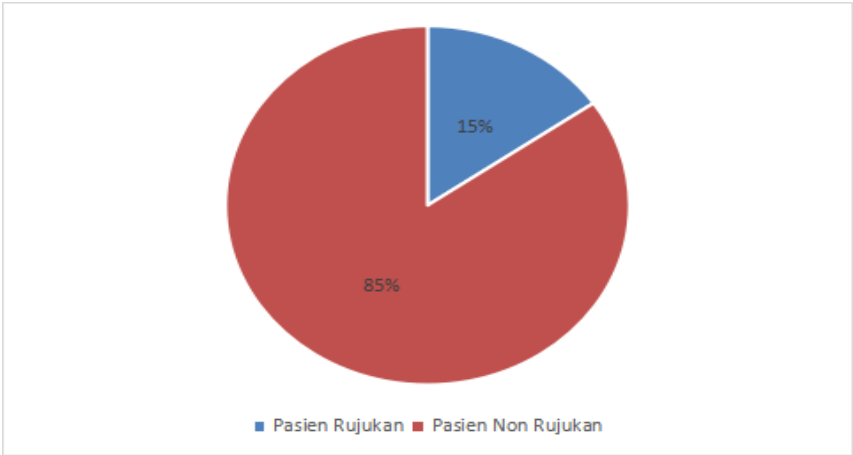
2. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

Grafik 8
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Periode: Januari s.d. Maret 2025



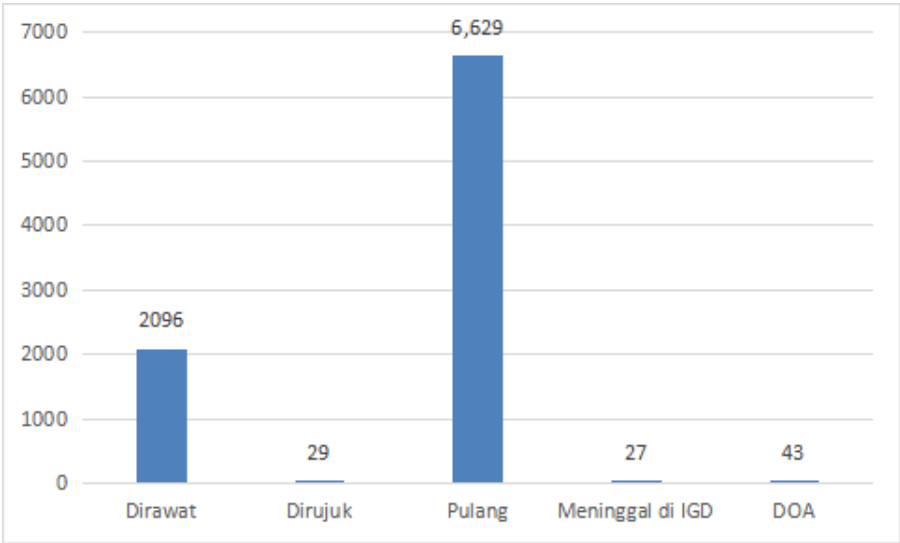
Grafik menunjukkan tren penurunan kunjungan pasien IGD dari Januari s.d. Maret 2025. Jumlah kunjungan terendah terjadi pada bula Februari 2025 (2001). Penurunan jumlah kunjungan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan layanan kesehatan primer yang mengurangi beban IGD atau perbaikan pola kesehatan masyarakat.

Grafik 9
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Status Rujukan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Sebanyak 85% dari total kunjungan pasien IGD adalah pasien non-rujukan. Hanya 15% dari total kunjungan IGD merupakan pasien rujukan. Proporsi non-rujukan yang tinggi dapat menyebabkan beban kerja di IGD menjadi lebih berat karena mencakup kasus-kasus yang seharusnya dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer. Upaya peningkatan sistem rujukan, termasuk edukasi masyarakat dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan IGD dan memprioritaskan penanganan kasus-kasus yang benar-benar darurat.

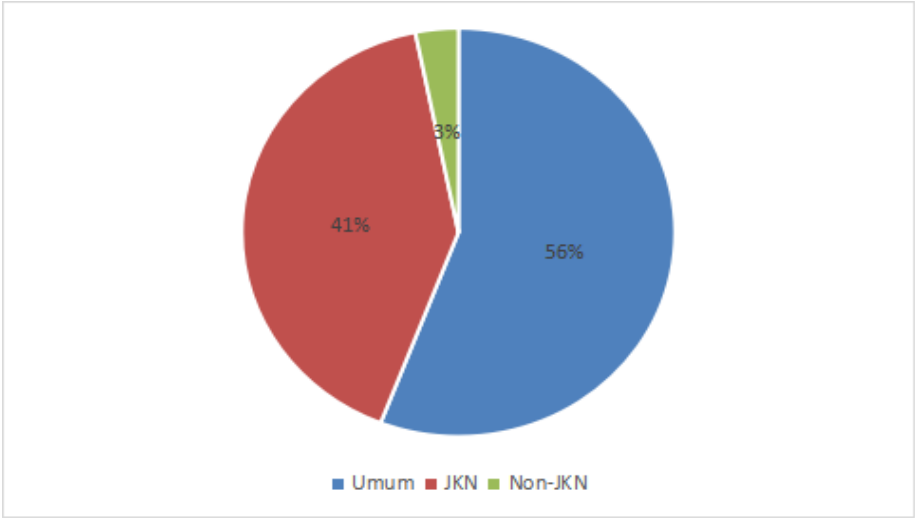
Grafik 10
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Tindak Lanjut Pelayanan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Jumlah pasien yang pulang pada periode Januari s.d. Maret 2025 mencapai 6629, yang merupakan mayoritas dari total kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani di IGD adalah kondisi yang dapat diatasi tanpa perlu perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kasus di IGD dapat ditangani tanpa rawat inap. Namun, adanya jumlah pasien meninggal di IGD dan DOA yang terjadi

memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap kecepatan penanganan darurat dan aksesibilitas layanan kesehatan darurat dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan sistem triase dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya membawa pasien ke rumah sakit lebih awal dalam situasi darurat.

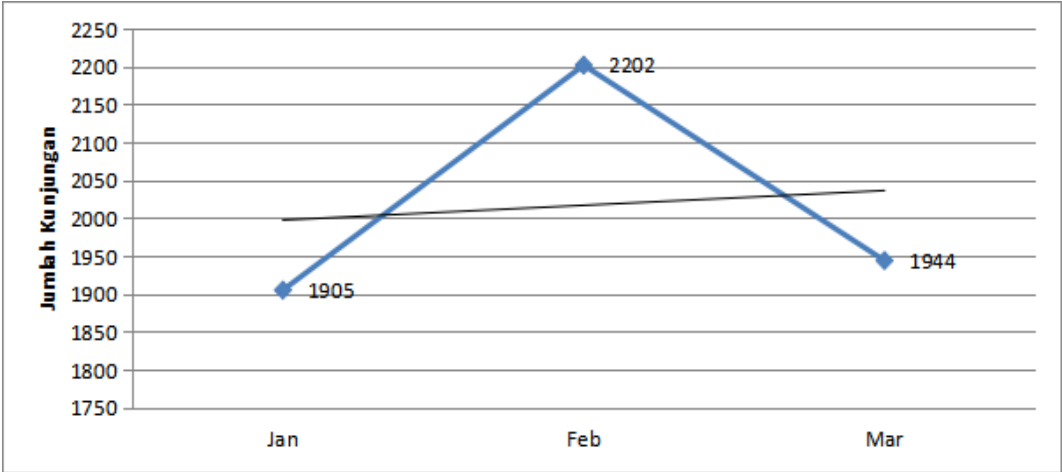
Grafik 11
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Cara Bayar
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Sebagian besar pasien IGD RSUD Kota Yogyakarta datang dengan kategori Umum (3706), diikuti oleh kategori JKN (2717) dan Non-JKN (212). Grafik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program JKN di wilayah tersebut, serta untuk merencanakan strategi peningkatan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan untuk memperluas kerja sama dengan berbagai penyedia asuransi, baik pemerintah maupun swasta, guna memberikan lebih banyak opsi pembayaran bagi pasien.

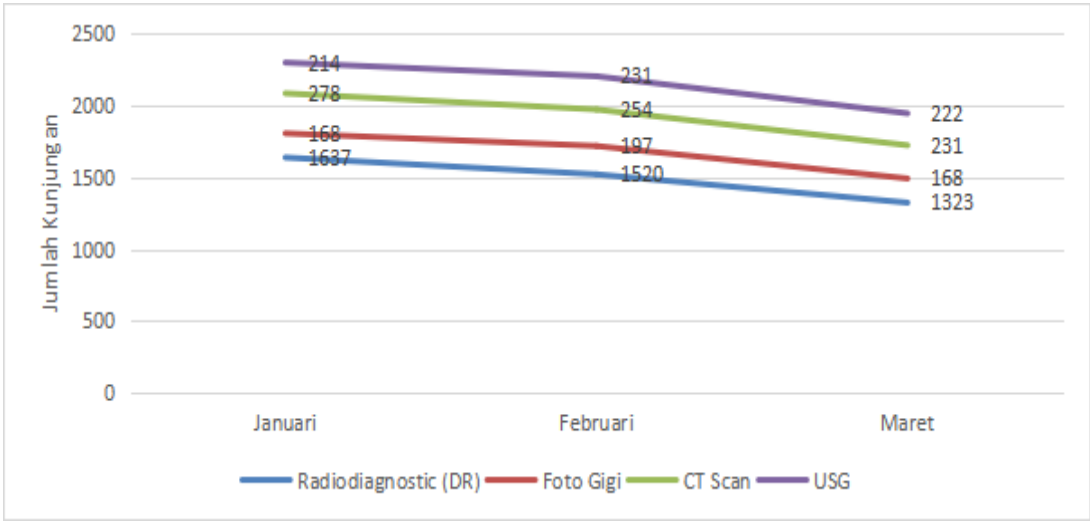
C. PELAYANAN PENUNJANG
1. Pelayanan Radiologi

Grafik 12
Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Jumlah kunjungan pasien Radiologi pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 cenderung mengalami peningkatan.

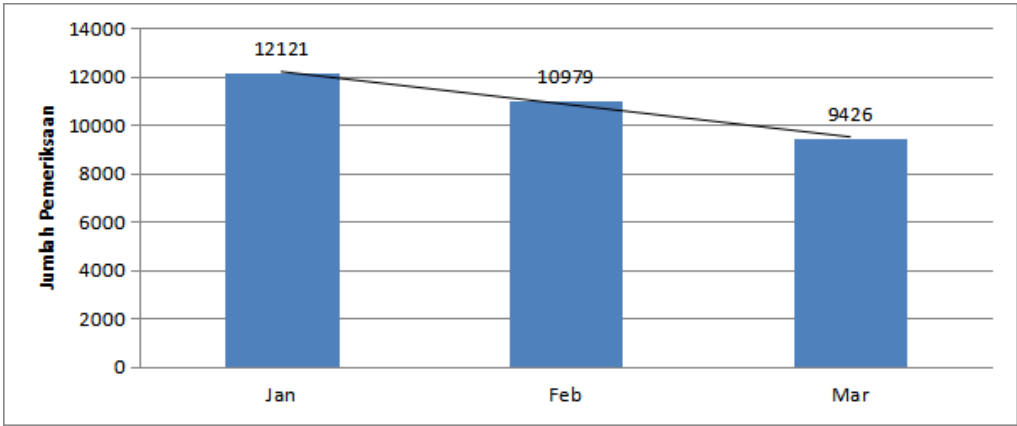
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Radiologi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Pada periode Januari s.d. Maret 2025 terjadi penurunan pemeriksaan radiologi. Perlu evaluasi apakah penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah pasien secara umum atau adanya hambatan layanan.

2. Pelayanan Laboratorium

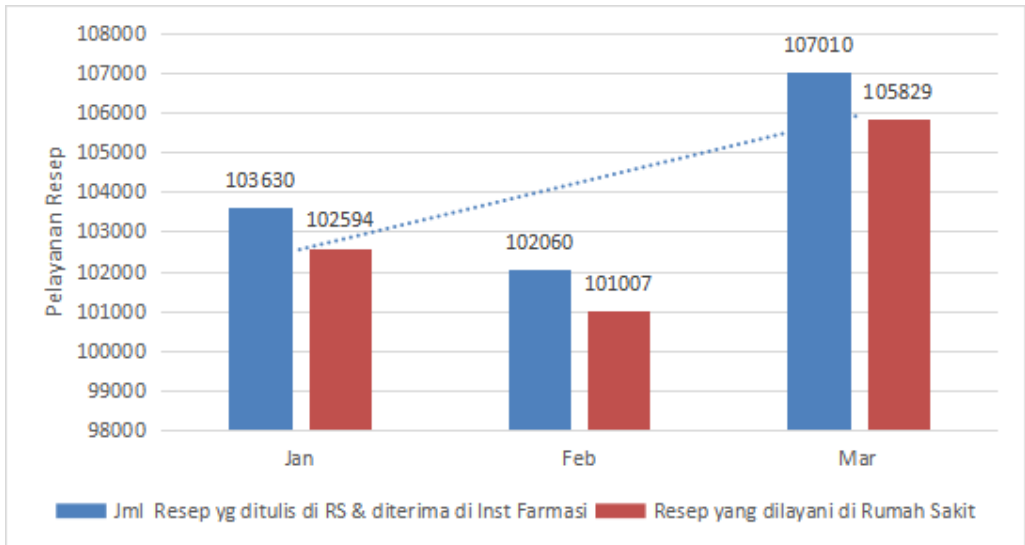
Grafik 14
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Pada periode Januari s.d. Maret 2025, jumlah pemeriksaan laboratorium mengalami penurunan setiap bulannya. Bulan Januari memiliki pemeriksaan terbanyak, yaitu 1121 dan Bulan Maret mencatat angka pemeriksaan terendah, yaitu 9426.

3. Pelayanan Farmasi

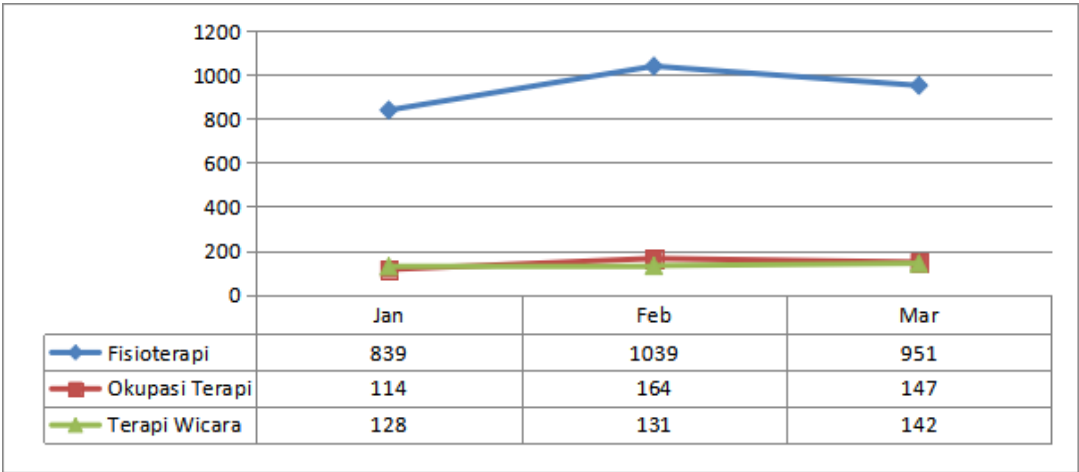
Grafik 15
Jumlah Kegiatan Farmasi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Data ini menggambarkan tingginya volume kegiatan farmasi di RSUD Kota Yogyakarta selama triwulan 1 tahun 2025. Instalasi Farmasi berhasil mempertahankan tingkat pelayanan yang sangat tinggi, dengan hampir semua resep yang diterima berhasil dilayani.

4. Pelayanan Rehabilitasi Medis

Grafik 16
Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis
Periode: Januari s.d. Maret 2025

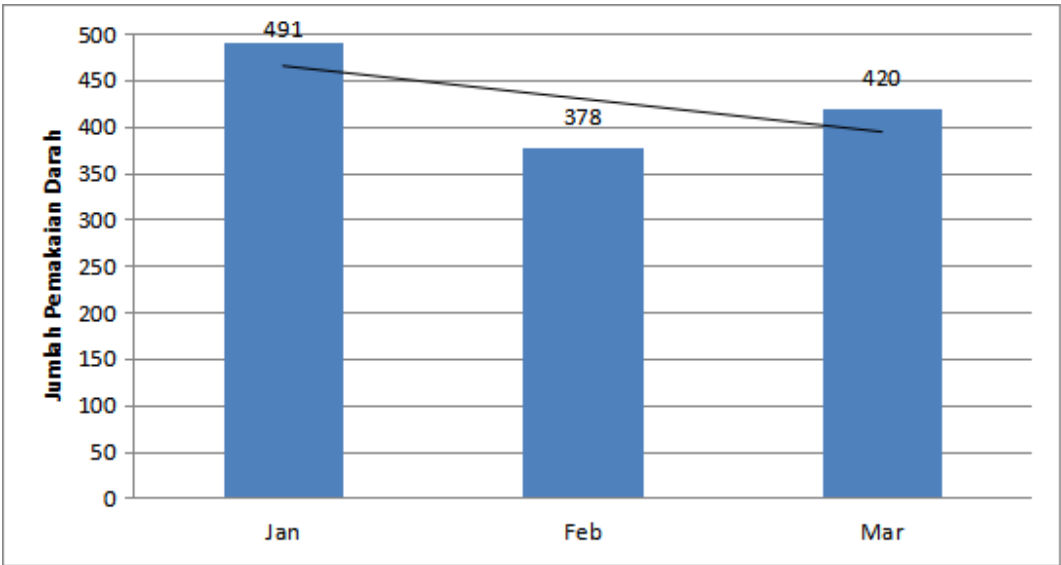


Semua layanan terapi mengalami peningkatan kunjungan secara keseluruhan dalam triwulan pertama. Fisioterapi memiliki volume tertinggi dan tren naik yang kuat. Okupasi terapi dan terapi wicara meningkat secara moderat,

menunjukkan adanya kebutuhan yang stabil terhadap layanan rehabilitasi non-fisik.

5. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

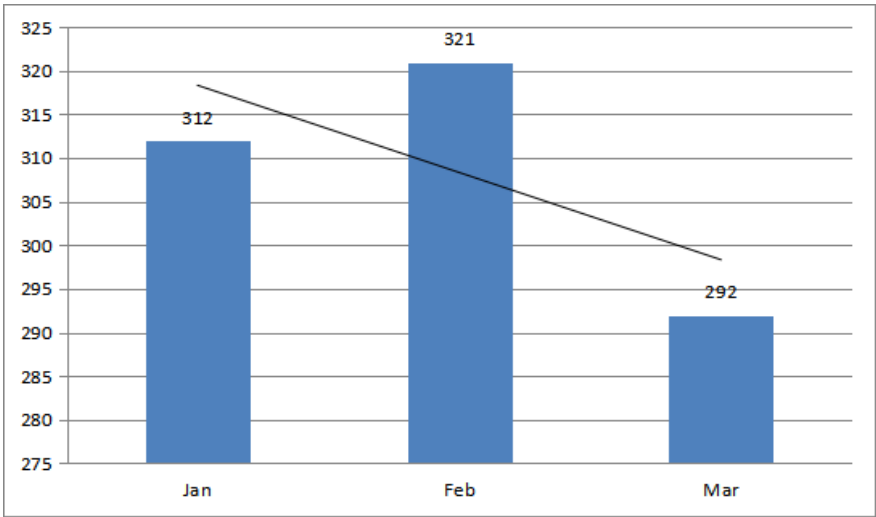
Grafik 17
Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Terdapat penurunan pemakaian darah secara keseluruhan dari Januari ke Maret. Meskipun Maret menunjukkan pemulihan dari penurunan Februari, totalnya masih lebih rendah dibanding Januari. Pola ini bisa menunjukkan faktor musiman, perubahan jumlah kasus medis tertentu, atau efisiensi penggunaan darah.

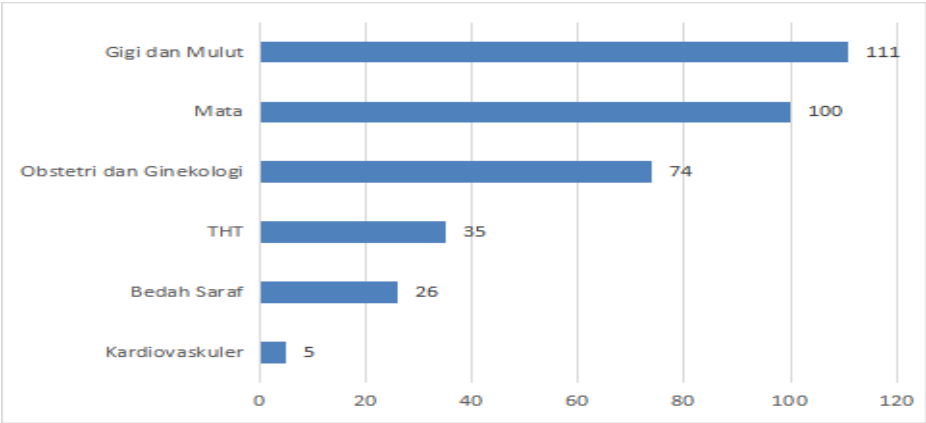
6. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Grafik 18
Jumlah Tindakan Operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Secara keseluruhan, terdapat tren penurunan dari Januari ke Maret, seperti yang digambarkan oleh garis tren pada grafik bulan Februari mencatat angka tertinggi yaitu 321, naik sedikit dibanding Januari (312). Pada bulan Maret mengalami penurunan signifikan ke 292, turun sekitar 9% dari Februari.

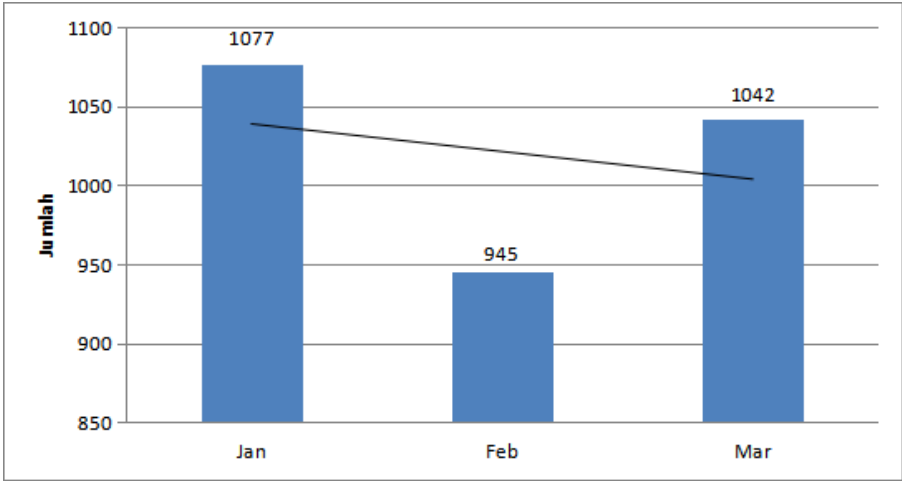
Grafik 19
Jumlah Tindakan Operasi Berdasarkan Spesialisasi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Apabila dilihat dari jenis spesialisasinya, Gigi dan Mulut menempati posisi pertama dengan 111 kunjungan, menunjukkan kebutuhan layanan ini paling tinggi. Mata menyusul di posisi kedua (100 kunjungan), selisih sedikit dengan Gigi dan Mulut. Obstetri dan Ginekologi berada di urutan ketiga dengan 74 kunjungan, mencerminkan kebutuhan yang signifikan, khususnya dari pasien perempuan. THT dan Bedah Saraf memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit (35 dan 26) dan Kardiovaskuler adalah yang paling rendah (hanya 5).

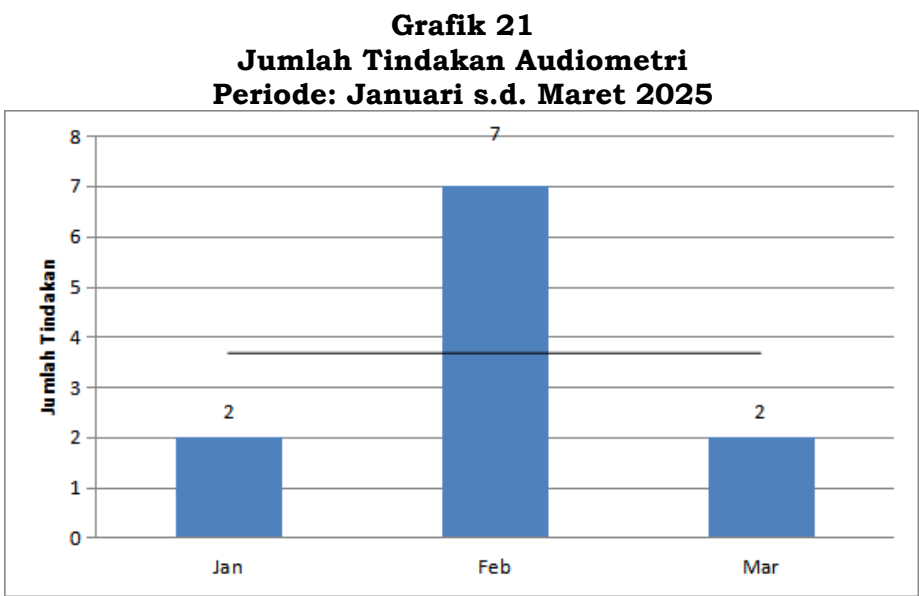
7. Pelayanan Hemodialisa

Grafik 20
Jumlah Tindakan Hemodialisa
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Grafik batang di atas menunjukkan jumlah total suatu aktivitas atau kejadian selama tiga bulan pertama dalam setahun, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan Januari, jumlahnya mencapai angka tertinggi yaitu 1.077. Namun, pada bulan Februari terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 945, menandakan adanya penurunan aktivitas atau frekuensi sebesar 132 dari bulan sebelumnya. Meski begitu, pada bulan Maret terlihat ada pemulihan dengan kenaikan jumlah menjadi 1.042, meskipun belum kembali menyamai capaian pada Januari. Secara keseluruhan, tren selama tiga bulan tersebut menunjukkan adanya fluktuasi, dengan penurunan di bulan kedua dan peningkatan kembali di bulan ketiga, meskipun garis tren secara umum masih menunjukkan arah menurun. Hal ini bisa menjadi indikator adanya faktor musiman, kebijakan baru, atau kondisi khusus yang memengaruhi penurunan dan kenaikan jumlah tersebut.

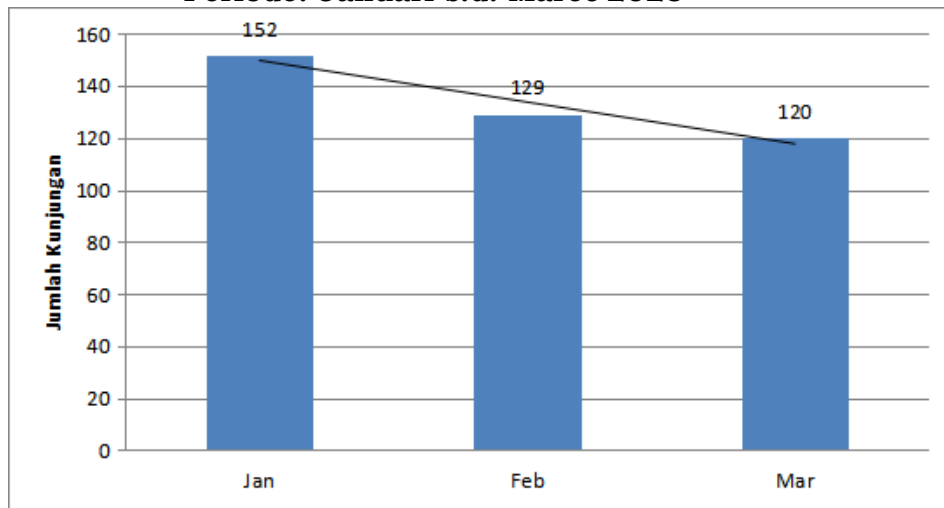
8. Pelayanan Audiometri



Grafik di atas menggambarkan jumlah tindakan Audiometri yang dilakukan selama tiga bulan pertama, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan Januari dan Maret, jumlah tindakan tercatat sama yaitu 2 tindakan, menunjukkan kestabilan pada dua bulan tersebut. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada bulan Februari, di mana jumlah tindakan meningkat drastis menjadi 7 tindakan, jauh di atas bulan lainnya.

9. Pelayanan Kemoterapi

Grafik 22
Jumlah Tindakan Kemoterapi
Periode: Januari s.d. Maret 2025

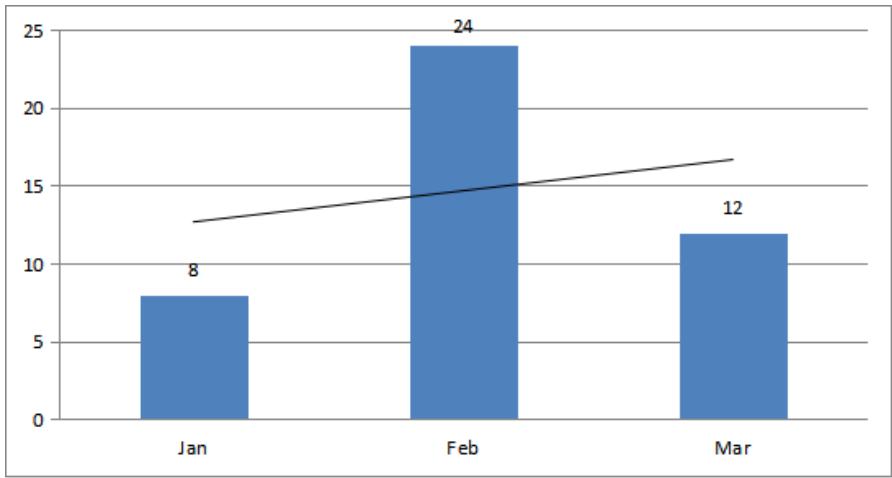


Berdasarkan data jumlah tindakan kemoterapi dari bulan Januari hingga Maret, terlihat adanya tren penurunan bertahap. Pada bulan Januari, tercatat 152 tindakan kemoterapi, kemudian menurun menjadi 129 tindakan di bulan Februari, dan kembali mengalami penurunan pada bulan Maret menjadi 120 tindakan. Penurunan ini menunjukkan adanya selisih 23 tindakan dari Januari ke Februari, dan 9 tindakan dari Februari ke Maret. Meskipun penurunan dari Februari ke Maret tidak sebesar penurunan sebelumnya, pola ini tetap mengindikasikan penurunan konsisten selama tiga bulan berturut-turut.

Beberapa kemungkinan penyebab tren ini dapat meliputi: menurunnya jumlah pasien yang menjalani kemoterapi, keberhasilan pengobatan sebelumnya, atau perubahan kebijakan dan jadwal pelayanan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab pasti dari penurunan ini dan apakah tren tersebut bersifat sementara atau akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya.

10. Pelayanan Cathlab

Grafik 23
Jumlah Tindakan Cathlab
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Berdasarkan data jumlah tindakan Cathlab dari bulan Januari hingga Maret, terlihat adanya fluktuasi signifikan. Pada bulan Januari, tercatat 8 tindakan, lalu mengalami peningkatan tajam menjadi 24 tindakan di bulan Februari. Namun, pada bulan Maret, jumlah tindakan kembali menurun menjadi 12 tindakan. Kenaikan dari Januari ke Februari sebesar 16 tindakan menunjukkan peningkatan aktivitas atau kebutuhan tindakan Cathlab yang cukup drastis, bahkan tiga kali lipat dari bulan sebelumnya. Penurunan pada Maret menjadi 12 tindakan menunjukkan penurunan sebanyak 12 tindakan dari Februari, namun masih lebih tinggi dibandingkan Januari.

Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah pasien dengan kondisi jantung akut di bulan Februari, adanya program skrining atau pemeriksaan massal, atau efisiensi layanan yang meningkat. Penurunan di bulan Maret bisa berkaitan dengan normalisasi jumlah pasien, keterbatasan operasional, atau faktor musiman. Data ini penting untuk dievaluasi lebih lanjut guna mengetahui penyebab perubahan dan untuk perencanaan sumber daya yang lebih baik.

Pencapaian Kinerja Keuangan Sampai Dengan Bulan Maret 2025

Adanya ketentuan peraturan perundangan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah RI harus mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014. Angka kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kota Yogyakarta telah mencapai 99,57% dari total penduduk, dengan 413.237 peserta dari total 415.021 jiwa. Keaktifan peserta mencapai 89,84%, atau 372.874 jiwa. Artinya, hampir seluruh warga Kota Yogyakarta terdaftar dalam Program JKN. Namun, hanya 89,84% yang dalam kondisi aktif. Angka partisipasi JKN belum

mencapai 100% karena dinamika kependudukan di Kota Yogyakarta, seperti kelahiran baru, kematian, dan perpindahan penduduk. Sebagai RS milik pemerintah, sebagian besar pasien RSUD Kota Yogyakarta adalah masyarakat peserta JKN sehingga pendapatan terbesar RS berasal dari klaim BPJS Kesehatan. Maka dari itu kinerja penerimaan pendapatan dipengaruhi oleh pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN). Presentase jumlah kunjungan pasien berdasarkan cara bayar sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Kunjungan Berdasarkan Cara Bayar TW I 2025

Cara Bayar	Rawat Jalan	IGD	Rawat Inap
JKN	72%	41%	90%
Umum	25%	56%	5%
Lainnya	3%	3%	4%

Kunjungan pasien sampai dengan bulan Maret 2025 rawat jalan dan rawat inap didominasi oleh pasien JKN, sedangkan IGD didominasi oleh pasien umum.

Status PPK BLUD pada RSUD Kota Yogyakarta sesuai Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/KEP/2007 tanggal 21 September 2007 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit. Tabel berikut adalah penerimaan pendapatan sampai dengan bulan Maret 2025:

Tabel 2.8
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D BULAN INI	%
4	PENDAPATAN DAERAH	112.000.210.000,00	29.059.554.022,00	25,95%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.000.210.000,00	29.059.554.022,00	25,95%
4.1.02	Retribusi Daerah	14.361.900.000,00	4.409.201.268,00	30,70%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.322.000.000,00	4.393.052.268,00	30,67%
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.322.000.000,00	4.393.052.268,00	30,67%
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.322.000.000,00	4.393.052.268,00	30,67%
	- Retribusi Pelayanan Pasien Umum	10.398.000.000,00	3.338.430.720,00	32,11%
	- Klaim BPJS Ketenagakerjaan	240.000.000,00	22.594.054,00	9,41%
	- Klaim Jamkesda Kota Yogyakarta	144.000.000,00	130.329.058,00	90,51%
	- Klaim Jasa Raharja	3.540.000.000,00	896.333.927,00	25,32%
	- Klaim Penjaminan Lain		5.364.509,00	0,00%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	39.900.000,00	16.149.000,00	40,47%
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	39.900.000,00	16.149.000,00	40,47%
	Retribusi Pemakaian Ruangan	6.000.000,00	8.850.000,00	147,50%
	- Retribusi Sewa Aula	6.000.000,00	8.850.000,00	147,50%
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	33.600.000,00	7.299.000,00	21,72%
	- Retribusi Sewa Ambulans	33.600.000,00	7.299.000,00	21,72%
	Retribusi Pemakaian Alat	300.000,00	-	0,00%
	- Retribusi Sewa Manekin	300.000,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	97.638.310.000,00	24.650.352.754,00	25,25%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	97.638.310.000,00	24.650.352.754,00	25,25%
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	96.750.900.000,00	24.490.066.187,00	25,31%
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	96.750.900.000,00	24.490.066.187,00	25,31%
	- Klaim BPJS Kesehatan	95.700.000.000,00	24.264.148.086,00	25,35%
	- Klaim Jamkesos	300.000.000,00	51.055.101,00	17,02%
	- Klaim Jamkesda Kab. Bantul	900.000,00	5.000.000,00	555,56%
	- Klaim Penjaminan Lain	18.000.000,00	-	0,00%
	- Pendapatan Diklit	732.000.000,00	169.863.000,00	23,21%
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	189.810.000,00	81.607.634,00	42,99%
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	189.810.000,00	81.607.634,00	42,99%
	- Vaksin	-	-	0,00%
	- Kerja Sama Promosi Kesehatan	44.142.500,00	6.780.000,00	15,36%
	- Kerja Sama EDC	-	-	0,00%
	- Kerja Sama Pengolahan Limbah	12.000.000,00	-	0,00%
	- Kerja Sama Vending Machine	6.000.000,00	1.627.634,00	27,13%
	- Sewa Gedung Kantor BPD	-	-	0,00%
	- Sterilisasi Alat	-	2.000.000,00	0,00%
	- Kerja Sama Sewa Lahan Parkir	57.000.000,00	37.000.000,00	64,91%
	- Kerja Sama Sewa Ruang ATM	48.000.000,00	-	0,00%
	- Kerja Sama Sewa Kantin/Minimarket	22.667.500,00	34.200.000,00	150,88%
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	-	-	0,00%
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	-	-	0,00%
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	697.600.000,00	78.678.933,00	11,28%
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	30.000.000,00	7.546.447,00	25,15%
	- Pendapatan Jasa Giro	30.000.000,00	7.546.447,00	25,15%
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	666.000.000,00	70.833.326,00	10,64%
	- Pendapatan Bunga Deposito	666.000.000,00	70.833.326,00	10,64%
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	1.600.000,00	299.160,00	18,70%
	- Pengembalian Pegawai, Denda BPJS, Hadiah, dll	1.600.000,00	299.160,00	18,70%
	Jumlah	112.000.210.000,00	29.059.554.022,00	25,95%

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, penerimaan pendapatan sampai dengan bulan Maret sebesar Rp.29.059.554.022,- dengan target anggaran murni 2025 sebesar Rp.112.000.210.000,- atau sebesar 25,95%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta.
2. Kamar rawat inap standar KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan sudah 90% siap dan sudah dilakukan uji coba akan tetapi belum ada juknis tentang tarif dan teknis pelaksanaannya;
3. Adanya keterbatasan dana untuk mewujudkan masterplan yang telah disusun dalam pengembangan bangunan gedung RS.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja RSUD Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Upaya pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk KRIS sesuai standar yang telah dilakukan secara bertahap dan sampai dengan tahun 2025 ini masih terus berlangsung.
2. Upaya pemenuhan SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung jejaring pengampunan 10 layanan prioritas Kemenkes RI;
3. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang BPJS Kesehatan yang membatasi akses pasien ke RSUD Kota Yogyakarta;
4. Pengembangan bangunan gedung Rumah Sakit sesuai masterplan yang telah disusun untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan peluang bagi RSUD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Mengembangkan pelayanan dengan tidak hanya berorientasi pada pasien BPJS tetapi juga pada pelayanan pasien umum/non BPJS mengingat jumlah kunjungan pasien non BPJS di RSUD Kota Yogyakarta termasuk tinggi.
2. Penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 2025 merupakan peluang bagi Rumah Sakit untuk memaksimalkan pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan sehingga diupayakan untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk memaksimalkan daya tampung pasien.

3. Adanya penunjukan RSUD Kota Yogyakarta sebagai pengampu 10 layanan prioritas oleh Kementerian Kesehatan RI selain sebagai tantangan juga merupakan peluang bagi RSUD Kota Yogyakarta untuk mengembangkan pelayanan unggulan sesuai penunjukan tersebut.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan RSUD Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS membatasi akses pasien ke RSUD Kota Yogyakarta, sehingga diperlukan advokasi dengan BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Terkait rencana pemberlakuan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024, saat ini RSUD Kota Yogyakarta telah melakukan uji coba bagi pengguna layanan rawat inap BPJS Kesehatan kelas III. Akan tetapi sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) penerapan KRIS bagi Rumah Sakit, diharapkan Kementerian Kesehatan RI kedepan dapat menyusun regulasi yang jelas mengenai juknis KRIS mengingat saat ini yang diatur hanya bagi pengguna layanan BPJS kelas III.
3. Sistem pelayanan kesehatan yang menunjang 10 layanan prioritas diantaranya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro, Kesehatan Jiwa, gastrohepatologi, infeksi emerging, diabetes mellitus, pencegahan dan tindakan penyakit tuberkulosis paru (TBC) serta penyakit katastropik,. Dalam rangka transformasi sistem kesehatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022-2024, serta akselerasi sinergi program rumah sakit jejaring prioritas nasional, RSUD Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas pada 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan sebagai RS rujukan terhadap layanan prioritas di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
4. Layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu RSUD Kota Yogyakarta telah menyusun masterplan pembangunan Rumah Sakit pada tahun 2021. Akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk mewujudkan layout bangunan seperti masterplan tersebut. Sebagai tahap awal mewujudkan masterplan, pada tahun 2023 telah diselesaikan pembangunan tahap 1 berupa pembangunan gedung

untuk instalasi gizi dan gudang farmasi kemudian pada tahun 2024 dilakukan pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan beberapa rehab gedung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RS. Pada tahun 2025 ini dilanjutkan pembangunan gedung IBS lantai 3 yang pada tahun 2024 telah selesai dibangun konstruksinya.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan RSUD Kota Yogyakarta

Target kinerja Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, dimana dalam Renstra 2025-2029 ini RSUD Kota Yogyakarta dan RS Pratama Yogyakarta berkolaborasi sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator tujuan “Prevalensi Balita Stunting” dan “Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun”. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran RSUD Kota Yogyakarta yaitu sasaran pertama “Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta” dengan indikator sasaran “Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta”; sasaran kedua adalah “Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif” dengan indikator sasaran “Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Prevalensi Balita Stunting (Persentase)	10,06	10,05	10,04	10,03	10,02
			Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (Indeks)	0,976	0,977	0,977	0,978	0,979
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta	Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta (Predikat)	Paripurna (>80%)	Paripurna (>80%)	Paripurna (>80%)	Paripurna (>80%)	Paripurna (>80%)
		Terwujudnya tata kelola RSUD Kota Yogyakarta yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	A (86,25-89,25	A (86,50-89,50	A (86,75-89,75	A (87,00-90,00	A (87,25-90,25

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada periode perubahan tahun 2025. Pada periode anggaran perubahan ini terdapat perubahan indikator program, sedangkan indikator kegiatan dan sub kegiatan hanya menyesuaikan terhadap perubahan besaran anggaran pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang berupa penambahan atau pengurangan.

3.2 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan Renja, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 10 (sepuluh) rumusan kegiatan, dan 20 (dua puluh) rumusan sub kegiatan. Indikator program sesuai Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada Perubahan Renja 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Program Tahun 2025

Program	Indikator Program	Target 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta	85%
	Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta	A (84,15-87,10)
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta	4.34
	Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran	100%
	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta	100%
	Nilai Penguatan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit	5
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN RSUD Kota Yogyakarta	83.73
	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta	87
	Nilai Penguatan Aset RSUD Kota Yogyakarta	5
	Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta	100%
	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta	5
	Persentase laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD RSUD Kota Yogyakarta yang berkualitas dan tepat waktu	100%

Program	Indikator Program	Target 2025
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit	85.50%
	Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar	64.60%
	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	84%
	Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit	88%
	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	80.75%
	Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit	81%
	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	85%
	Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan	85%
	Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA	29 Modul

Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.169.107.309.936,- (seratus enam puluh sembilan milyar seratus tujuh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta, penerimaan pendapatan BLUD dan pemanfaatan SILPA BLUD tahun 2024. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.26.476.993.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Keperawatan, terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.26.023.500.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

 - 1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran Rp.4.722.500.000,-
 - 2) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran Rp.2.685.000.000,-
 - 3) Pengembangan Rumah Sakit, dengan anggaran Rp.7.751.000.000,-

- 4) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, dengan anggaran Rp.10.865.000.000,-
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.183.493.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan anggaran Rp.43.493.000,-
 - 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, dengan anggaran Rp.105.000.000,-
 - 3) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), dengan anggaran Rp.35.000.000,-
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, dengan anggaran Rp.270.000.000,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk program ini sebesar Rp.142.630.316.936,-
Program ini dilaksanakan oleh Bagian Keuangan PEP dan Bagian Umum, terdiri dari 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.450.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.10.450.000,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.434.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp.10.434.000,-
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.5.073.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp.5.073.000,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.156.189.719,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.11.826.000,-
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.144.363.719,-
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.9.697.200.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.2.797.200.000,-
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.6.900.000.000,-
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.724.327.356,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.46.620.000,-
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp.44.450.000,-
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.452.700.000,-
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp.180.557.356,-
- g. Peningkatan Pelayanan BLUD
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.132.026.642.861,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp.132.026.642.861,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.3 Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						151.643.382.710	151.461.077.075	169.107.309.936	17.646.232.861										
1	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						151.643.382.710	151.461.077.075	169.107.309.936	17.646.232.861						0				
	1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran				100 %	128.293.388.710	124.377.584.075	142.630.316.936	18.252.732.861						0				
				Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta				4,34 - 4,50														
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta				85,00%														
				Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta				A														
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	100%	12.125.000	10.450.000	10.450.000	0		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta	0	RSUD Kota Yogyakarta		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													0	RSUD Kota Yogyakarta		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.125.000	10.450.000	10.450.000	0	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta				12 Laporan	5 nilai	11.996.000	10.434.000	10.434.000	0		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta	0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.996.000	10.434.000	10.434.000	0	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
	1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN RSUD Kota Yogyakarta				3 Dokumen	87,82-91,20	5.952.000	5.073.000	5.073.000	0		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit	0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai																
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	5.952.000	5.073.000	5.073.000	0	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	1	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	1	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor														
	1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	1	02	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan														
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1	02	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Tahun 2023	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1.02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	298 Unit	284 Unit	344.874.170	336.334.170	452.700.000	116.365.830	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1.02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	1.02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.000.000.000	111.685.936	180.557.356	68.871.420	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1.02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	1.02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Laporan Hasil Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang Berkualitas dan Tepat Waktu	1 Unit kerja	100%	114.380.410.000	114.380.410.000	132.026.642.861	17.646.232.861			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1.02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1 Unit kerja	114.380.410.000	114.380.410.000	132.026.642.861	17.646.232.861	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0	RSUD Kota Yogyakarta	
2	1.02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar		64,60%	23.349.994.000	27.083.493.000	26.476.993.000	-606.500.000						0		
						Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit		85,50%												
	1.02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit	12 Paket	88%	22.830.000.000	26.630.000.000	26.023.500.000	-606.500.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta	0	RSUD Kota Yogyakarta	
						Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit		81%												
	1.02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24 Unit	4 Unit	3.135.000.000	4.734.000.000	4.722.500.000	-11.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, orosutan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1.02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
	1.02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	14 Unit	2.775.000.000	2.475.000.000	2.685.000.000	210.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	RSUD Kota Yogyakarta	
	1.02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	5.600.000.000	8.601.000.000	7.751.000.000	-850.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 paket	12 Paket	11.320.000.000	10.820.000.000	10.865.000.000	45.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.02.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0022	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan				1 Laporan 2 Dokumen	85%	189.994.000	183.493.000	183.493.000	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	49.994.000	43.493.000	43.493.000	0	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				110 Orang	110 orang	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA				22 Unit	29 Modul	330.000.000	270.000.000	270.000.000	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000	270.000.000	270.000.000	0	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

3.3 CROSSCUTTING KINERJA

Crosscutting kinerja merupakan program atau kegiatan yang melibatkan pihak lain baik perangkat daerah maupun organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama atau saling terkait dalam mencapai target kinerja tertentu. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak lain ini tidak hanya terbatas pada satu bidang atau urusan, melainkan melibatkan berbagai organisasi yang bekerja bersama untuk mencapai hasil yang optimal. Crosscutting kinerja ini menunjukkan pentingnya integrasi dan kolaborasi antar organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Crosscutting kinerja RSUD dalam tahun anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dalam hal ini RSUD berkedudukan sebagai OBK (Organisasi Bersifat Khusus) yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sehingga Dinas Kesehatan berperan dalam pembinaan dan pengawasan RSUD dan juga bertindak sebagai regulator, memberikan perizinan, dan membina RSUD dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam perencanaan, pengembangan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD.

2. Puskesmas dan RS Pratama

Puskesmas dan RS Pratama yang berada dalam wilayah Kota Yogyakarta berperan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk rujukan ke rumah sakit (RSUD). Puskesmas juga berperan dalam upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat, sehingga mengurangi beban rumah sakit.

3. Rumah Sakit lain di wilayah DIY

Rumah sakit lain, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pelayanan RSUD sebagai mitra rujukan, penyedia layanan khusus, atau pusat pelatihan. Selain itu, rumah sakit lain juga dapat berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan, serta dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

4. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta

RSUP dr. Sardjito memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pelayanan RSUD. Secara umum, RSUP berfungsi sebagai rujukan utama untuk kasus-kasus yang lebih kompleks atau membutuhkan spesialisasi yang tidak tersedia di RSUD. Selain itu, RSUP juga berperan dalam pendidikan dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan di daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta berperan di kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan,

pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

6. Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta

Dalam crosscutting RSUD, Bagian Organisasi berperan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta

Berperan mendukung operasional dan pengembangan RSUD dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengadaan ASN, pengembangan kompetensi pegawai, manajemen kinerja, penyusunan kebijakan pegawai, penyediaan data dan informasi pegawai serta pendampingan dan konsultasi pengelolaan SDM.

8. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta

Membantu mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek administratif dan pembangunan untuk memastikan kelancaran pelayanan kesehatan, yang meliputi perencanaan dan pengembangan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya.

9. Inspektorat Kota Yogyakarta

Berperan sebagai pengawas internal yang bertugas memastikan operasional RSUD berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan. Inspektorat Kota Yogyakarta juga berperan dalam meningkatkan tata kelola RS, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mencegah korupsi dan penyalahgunaan, serta meningkatkan akuntabilitas.

10. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Berperan pada aspek penyediaan, pengembangan, dan pengawasan industri, serta fasilitasi terkait perindustrian. Peran ini sangat berarti dalam hal penyediaan alat kesehatan, perlengkapan medis, dan dukungan logistik yang berkaitan dengan kebutuhan operasional pelayanan RS.

11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Yogyakarta

BPBJ bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas dengan harga terbaik, sesuai kebutuhan rumah sakit, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Peran Dinas Dukcapil dalam hal penerbitan dokumen kependudukan bagi pasien, RS melakukan kerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk membantu memfasilitasi pengurusan akta kelahiran untuk bayi yang baru lahir di rumah sakit, serta akta kematian jika ada pasien yang meninggal dunia di rumah sakit. Hal ini juga bermanfaat bagi Dinas Dukcapil dimana pelayanan kependudukan dilakukan lebih cepat dan efisien.

13. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Dinas Kominfo berperan sebagai konsultan pengelolaan data dan informasi, penyusunan kebijakan, serta pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan Rumah Sakit.

14. Pihak-pihak lain sebagai penyedia barang dan jasa

Penyedia barang dan jasa memiliki peran krusial dalam operasional dan pelayanan di RSUD dimana kebutuhan pelayanan operasional RS yang meliputi pemenuhan sarana prasarana, ketersediaan peralatan medis dan non medis, obat-obatan, bahan habis pakai, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa parkir, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak ketiga sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi RSUD Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja RSUD Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis RSUD Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja RSUD Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025.



Mei 2025

Direktur RSUD Kota Yogyakarta

dr. Ariyudi Yunita, MMR
NIP. [REDACTED]